



MENYONGSONG UKPBJ ERA 4.0 UNTUK TATA KELOLA PENDIDIKAN YANG BAIK

Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta, Juni 2019

Jalan Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Latar Belakang

A Penguatan tata kelola Dana Transfer adalah kunci

- UU 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan lebih kepada daerah dalam pengelolaan pendidikan.
- Sekitar ~64% dari Rp488 Triliun anggaran pendidikan (APBD 2019) merupakan dana transfer daerah.

B Sektor PBJ pendidikan rawan

- Sekitar ~42% kasus korupsi terkat dengan PBJ.
- Sektor pendidikan merupakan sektor 3 (tiga) terbesar untuk korupsi terkait proses PBJ.
- Sekitar ~72% kasus korupsi pendidikan melibatkan oknum dinas pendidikan dan/atau sekolah.

C Elektronifikasi pengelolaan dana transfer adalah solusi

- Perpres No.16 Tahun 2018 tentang PBJPemerintah
- Perpres No.54 Tahun 2018 tentang Stranas PK yang mendorong percepatan katalog elektronik sektoral.
- Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sumber: Laporan KPK, APBN 2019, peraturan terkait

Strategic Initiatives

1

Strengthening internal capability of Ministry of Education and Culture

- Penguatan organisasi UKPBJ Kemendikbud:
 - Pemusatan dan penguatan SDM pada UKPBJ Kemendikbud.
 - Penambahan kewenangan UKPBJ sesuai Perpres No.16 Tahun 2018
- *Platform:* SirenBaja dan SIMPel

2

Building e-platform for managing the transfer fund (DAK)

Pengembangan *platform* untuk penguatan pengelolaan dana transfer pendidikan: SIPLah, katalog elektronik sekolah, etc

1 Transformasi Dimulai dari Kesiapan Organisasi, ...

Permendikbud 11/2018

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Permendikbud 38/2018

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Permendikbud 12/2019

Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1

Peningkatan Kapasitas SDM

- a) Pemusatan dan penambahan SDM pada UKPBJ Kemendikbud
- b) Peningkatan kelas kelembagaan UKPBJ Kemendikbud

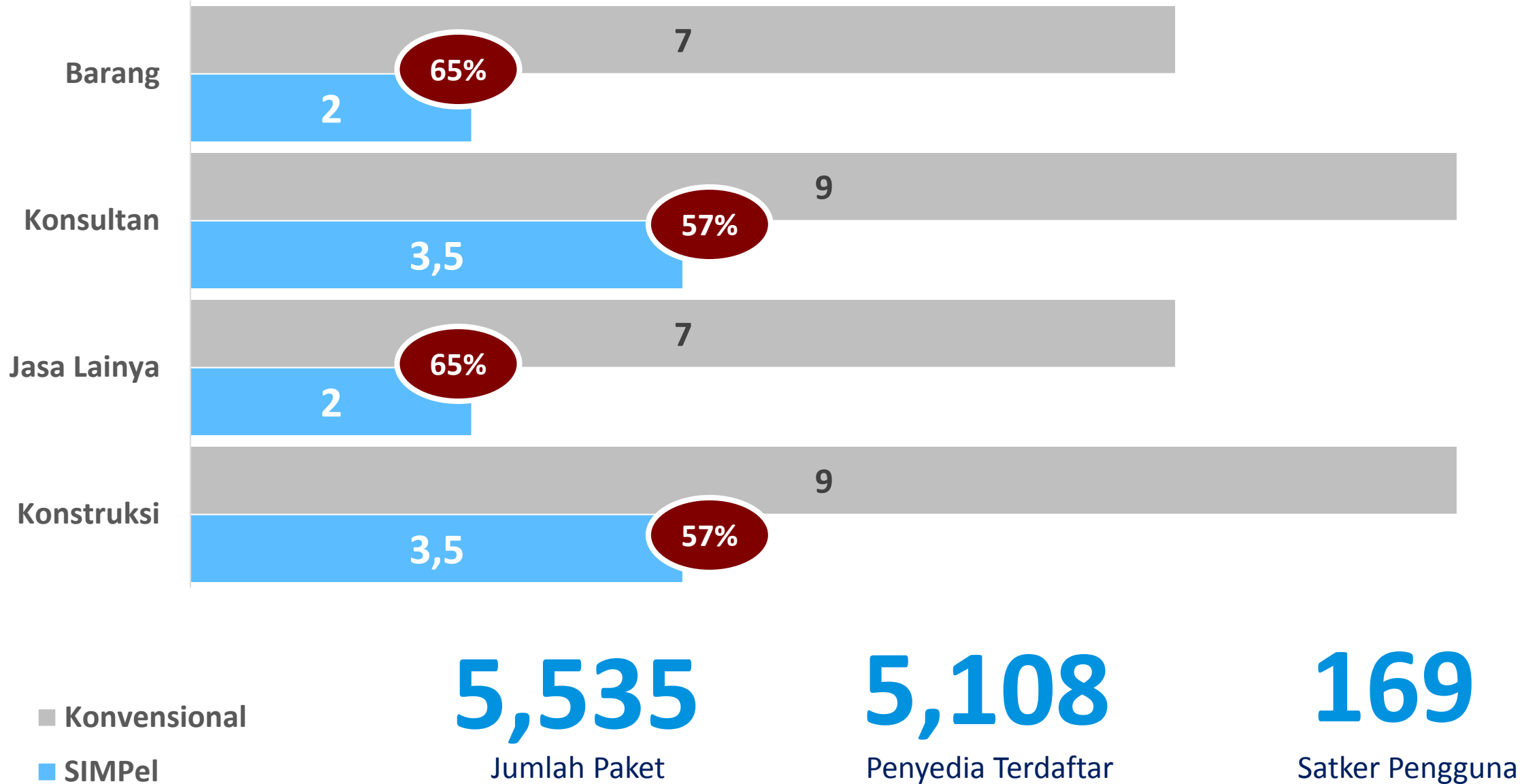
2

Perluasan Kewenangan

UKPB Kemendikbud sebagai pusat perumusan kebijakan PBJ dan pelaksanaan eksekusi PBJ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1, dan Pengalaman Pengembangan e-Platform...

Statistik efisiensi waktu SIMPel
(dalam hari dan %)



2 ...Kemudian, Mengembangkan e-Platform Dana Transfer

Inisiatif

SIPLah

(Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah)

Katalog Sektoral

(Katalog elektronik untuk sektor pendidikan)

e-Pendidikan

(Integrasi layanan pendidikan berbasis elektronik)

Keterangan

- SIPLah adalah Sistem elektronik yang dapat digunakan oleh sekolah untuk melaksanakan proses PBJ dana BOS secara daring (*Permendikbud 03/2019*).
 - SIPLah dirancang untuk memanfaatkan *market place*.
 - Selain fitur PBJ, SIPLah juga dilengkapi fitur untuk tertib administrasi
-
- Katalog sektor pendidikan mengacu pada Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Stranas Pencegahan Korupsi.
 - Penyelenggaran katalog sektoral bekerjasama dengan LKPP. Saat ini yang sudah berproses: buku non teks dan alat peraga pendidikan.
-
- Layanan pendidikan berbasis elektronik merupakan mandat dari Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang SPBE.
 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang telah dimanfaatkan untuk layanan pendidikan berbasis elektronik.

Status



Selesai



Selesai



Berproses

2 ..., Dimulai dari Katalog Sektoral Pendidikan,...



Buku Teks K13
(2016/2017)

43rb

Jumlah Sekolah

32,6jt

Jumlah Eksemplar

93%

Pemenuhan Pesanan



Alat Peraga
(2018-2019)

Rp1.2Tr (2018)

~Rp4.6Tr (2019)

Total Anggaran

700

Jenis Alat

3(tiga)

Jenjang Pendidikan
(SMP, SMK, PKLK)



Buku non Teks 2019

~Rp10Tr

Total Anggaran

~870jt

Jumlah Eksemplar

3,4rb

Jumlah Judul

2 ... dan SIPLah untuk PBJ Sekolah Efektif & Efisien

Manual

- Referensi daftar penyedia terbatas pada toko langganan sekolah
- Opsi pemilihan terbatas

Keterbatasan pemilihan menjadikan harga berada di range tinggi - rendah

Dokumentasi dilakukan secara manual oleh masing-masing sekolah

belum optimal dengan keterbatasan informasi transaksi sekolah

PENYEDIA

HARGA

DOKUMENTASI

TRANSPARANSI

SIPLah

dapat akses penyedia sekolah lain sehingga opsi lebih luas

tingkat harga cenderung lebih rendah (secara keseluruhan)

dokumentasi elektronik untuk setiap transaksi

Bank data membuat transaksi lebih transparan

Kesimpulan: Tiga (3) Fase Penguatan PBJ Pendidikan

1 Fase I : *Memperkuat kapasitas internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengelolaan PBJ Pemerintah*

- Penguatan kapasitas SDM melalui peningkatan kelas jabatan dan penambahan SDM UKPBJ.
- Penguatan kewenangan UKPBJ sebagai centre of excellence PBJ sektor pendidikan.
- Pengalaman dalam pengembangan dan/atau pengelolaan *e-platform*: SirenBaja dan SIPLah

2 Fase II : *Membangunan platform elektronik dalam pengelolaan PBJ untuk dana transfer pendidikan*

Membangun *platform* elektronik baik untuk sekolah maupun dinas pendidikan, seperti: Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), katalog sektoral pendidikan, etc

3 Fase III : *Integrasi platform elektronik pendidikan kedalam Sistem Layanan Pemerintah dalam Sektor Pendidikan (e-Pendidikan)*

Mengajukan layanan pendidikan berbasis elektronik (e-Pendidikan) yang terintegrasi, dengan embrio Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan *platform* elektronik yang telah dikembangkan

t e r i m a

k a s i h



+6285212288068 pengadaan@kemdikbud.go.id Pengadaan Kemdikbud
pengadaan_kemdikbud Pengadaan Kemdikbud PBJ_Kemdikbud
pengadaan.kemdikbud.go.id

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kemendikbud
Kompleks Kemendikbud Gedung C Lantai 14
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
pengadaan@kemdikbud.go.id - (021)57853580

